

## Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Palopo

Anwar

[anwar@stiem-bongaya.ac.id](mailto:anwar@stiem-bongaya.ac.id)

Fiar Ariandi

Email : [ariandyfiar@gmail.com](mailto:ariandyfiar@gmail.com)

STIEM Bongaya , Indonesia

✉ Corresponding Author:

**Nama author:** Anwar Telp./Hp 081355036322

E-mail: [anwar@stiem-bongaya.ac.id](mailto:anwar@stiem-bongaya.ac.id)

*Received : 15 Agustus 2021, Revised: 03 September 2021, Accepted: 25 September 2021,  
Published : 01 Oktober 2021*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari seluruh SKPD yang terletak di Kota Palopo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuisisioner dan Studi Kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada pemerintah kota Palopo,

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

**Abstract :** *This study aims to determine the effect between the implementation of regional financial management information systems and the quality of financial reports in the Palopo City Government. The research method used is a descriptive method using primary data obtained from all SKPD located in Palopo City. The data collection method used is a questionnaire and literature study with a qualitative approach. The analytical tool used in this research is simple regression. The results showed that the implementation of the regional financial management information system had a significant positive effect on the quality of regional financial reports. In the city government of Palopo,*

*Keywords: Regional Financial Management Information System, Quality of Financial Reports.*

### I. PENDAHULUAN

Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan

pemerintah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Harapan Pemerintah Kota Palopo dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kota Palopo adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2009. Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palopo diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan dan relevansi. Diharapkan dengan efektifnya penerapan SIPKD maka kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bagus dkk (2014) menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Seperti halnya dalam menjalankan pemerintahan terkhusus pada persoalan keuangan yang membutuhkan transparansi dan kualitas laporan keuangan maka informasi berperan penting, oleh karena itu sistem informasi menjadi jantung dari peredaran informasi tersebut. Dalam implementasinya sistem informasi telah mengalami perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sampai pada saat ini kita kenal dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada saat ini, pengimplementasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih belum berjalan dengan baik karena kondisi kinerja pegawai sendiri dimana kemampuan pegawai yang kurang optimal dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga sering terjadi kesalahan dalam menggunakan SIPKD. (<http://makassar.bpk.go.id/?s=lhp+kota+palopo>).

Peneliti sebelumnya Ovita dkk (2013) tentang Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil penelitian bahwa Implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dewi dan Mimba (2014) Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan

Keuangan dan hasil penelitian Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## II. LITERATUR REVIEW

### Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Romney (2014 : 3) Sistem Informasi adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan data yang diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki kualitas dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah kumpulan dari beberapa komponen dalam perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi organisasi (Mahendra dan Affandy, 2013)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2008:23). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Halim (2008 : 137) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan inventaris daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Selanjutnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. ([www.djkd.kemendagri.go.id](http://www.djkd.kemendagri.go.id)), Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang

berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Pembangunan sistem ini secara garis besar bertujuan untuk mendukung reformasi keuangan daerah menuju peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat peran dan fungsi keuangan daerah sebagai penggerak peningkatan kinerja ekonomi lokal dan peningkatan standar layanan. Sistem tersebut terdiri dari beberapa kelompok sistem yaitu:

1. *Core Function System* yang merupakan sistem utama pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan (*planning*), persiapan anggaran (*budget preparation*), pelaksanaan anggaran (*budget execution*), dan akuntansi (*accounting*)
2. *Non Core Function System* yang merupakan sistem pendukung pengelolaan keuangan daerah yang meliputi manajemen kas, manajemen pendapatan dan piutang, manajemen aset dan manajemen hutang
3. *Collaboration and Communication System* yang merupakan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan daerah yang meliputi fasilitas kolaborasi dan komunikasi

Sedangkan *output* dari SIPKD ini adalah berupa laporan-laporan, antara lain laporan BKU (Buku Kas Umum), Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Fungsional, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Jurnal Penerimaan, Jurnal Pengeluaran, Arus Kas, Buku Besar, Buku Pembantu.

Menurut Dewi dan Mimba (2014) yang mengemukakan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut

1. Keamanan Data  
Berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena bencana alam, tindakan disengaja maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
2. Kecepatan dan ketepatan waktu  
Berhubungan dengan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik untuk rentan waktu yang telah ditentukan.
3. Ketelitian  
Berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
4. Variasi laporan  
Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat sesuatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5. Relevansi sistem

Menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator Relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

### **Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:1.3) laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)  
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai, aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)  
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Supaya suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya, maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki :

- a) Manfaat umpan balik  
informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- b) Memiliki manfaat prediktif  
informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu atau kejadian masa lalu.
- c) Tepat waktu  
informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- d) Lengkap  
informasi mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

### 2. Andal

Informasi mungkin relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal dapat memenuhi karakteristik :

- a) Penyajian jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
- b) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang jauh beda

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

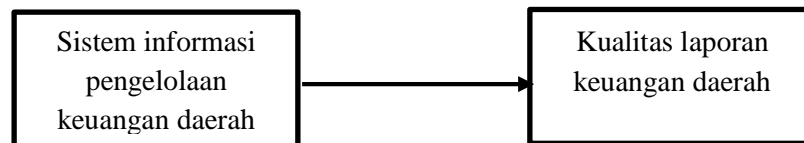
3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya tau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### Kerangka Konseptual



### III. METODOLOGI

**Metode:** Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Palopo Data dikumpul dengan menggunakan tekni kuesioner. Jumlah sampel sekaligus sebagai responden sebanyak 80 pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari 80 responden tersebut yang dapat mengembalikan koesioner sebanyak 50 responde. Variabel penelitian terdiri dari :

- a. Impelementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X), yakni aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur ini diadopsi dari penelitian Dewi dan Mimba, (2014). Diukur dengan menggunakan pernyataan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Keamanan Data, 2) Kecepatan dan Ketepatan Waktu, 3) Ketelitian, 4) Variasi Laporan, 5) Relevansi Sistem.
- b. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), Merupakan informasi bagi para pemakainya, maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan daerah ini diadopsi dari penelitian Dewi dan Mimba, (2014). Diukur dengan menggunakan pernyataan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan



Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu : 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, 4) Dapat Dipahami.

Kemudian dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis regresi sederhana, dengan persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan :

- Y** = Kualitas Laporan Keuangan
- $\alpha$**  = Konstanta
- $\beta$**  = koefisien regresi
- X** = Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan
- e** = Error

**Hasil Analisis:** Untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Pengujian ini (uji t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013:98). Data yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji dapat dilihat dalam tabel koefisien regresi berikut ini :

Tabel : Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.444	2.746		5.260	.000
1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.507	.075	.699	6.773	.000

a. Dependent Variable: total\_x

Sumber : *Output SPSS 20.*

Uji t dapat dilihat pada tabel koefisien regresi tersebut , yaitu pada nilai t dengan nilai  $df = n - k - 1 = 50 - 1 - 1 = 48$  maka  $t_{tabel}$  diperoleh yaitu (2,010). Pada tabel 4.8 nilai implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada kolom t sebesar 6,773. Berdasarkan data tersebut maka diketahui  $6,773 > 2,010$ . Artinya Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penentuan hasil perhitungan regresi ini dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



#### IV. PEMBAHASAN

Terdapat pengaruh positif signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan. Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang penting. Karena hal ini akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Dewi dan Mimba (2014) bahwa efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### V. KESIMPULAN

**Kesimpulan:** Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo

**Keterbatasan dan Saran:** Penulis harus menyajikan segala kekurangan dan keterbatasan utama dari penelitian ini, yang dapat mengurangi validitas tulisan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari para pembaca (apakah, atau dengan cara apa), keterbatasan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan. Keterbatasan memerlukan penilaian kritis dan interpretasi dampak penelitian mereka. Saran ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

Pemerintah daerah kota palopo sebaiknya mempertahankan Implementasi SIPKD, dikarenakan hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kualitas dalam menyusun sebuah laporan keuangan sangatlah memerlukan adanya peningkatan dalam pengimplementasian sistem informasi pemngelolaan Keuangan daerah.

#### REFERENSI

BPK, Melalui <http://makassar.bpk.go.id/?s=lhp+kota+palopo> (tanggal Akses:20 April 2015).

Charolina, Ovita dkk, 2013. *Pengaruh Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Fairness Vol.3 No.3.

Dewi, Ratna Ayu P. dan Ni Putu Sri Harta Mimba, 2014. *Pengaruh Eektiiitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.8 No. 3.

- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul, 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YPKN, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Irfianto, Dwi Siswo. dan Dian Arlupi Utami. 2013. *Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. E-jurnal Online Universitas Negeri Surabaya Vol. 1 No. 2
- Kuncoro, Mudrajat, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga Edisi 3, Jakarta.
- Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, 2015. [www.djkd.kemendagri.go.id](http://www.djkd.kemendagri.go.id) (Tanggal Akses : 15 April 2015).
- \_\_\_\_\_, 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Permadi, Angga Dwi, 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Pujiswara, Ida Bagus dkk, 2014. *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. E-jurnal Vol.2 No. 1.
- Romney, Marshall B. dan Paul Jhon Stembar, 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods For Business*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sunyoto, Danang, 2011. *Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi*. CAPS, Yogyakarta

